



## TAMBAH ANGGARAN PERBAIKAN TALUT RP 500 JUTA

# Akhir Bulan Tak Terserap, Kembali ke Kas Daerah

**YOGYA (KR)** - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya mengajukan anggaran perbaikan talut sebesar Rp 500 juta melalui perubahan APBD. Akan tetapi jika sampai akhir bulan ini tidak terserap, maka dana insidental tersebut terpaksa harus dikembalikan ke kas daerah.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kota Yogya Aki Lukman, mengatakan pengajuan tambahan dana insidental untuk perbaikan talut tersebut dilakukan karena alokasinya sudah habis. "Sejak Januari sampai masa pandemi itu anggaran perbaikan talut sudah habis. Makanya dalam APBD perubahan kemarin kami tambah. Itu pun ada syaratnya, yakni hanya untuk kerusakan yang terjadi sampai akhir Oktober," tandasnya, Rabu (14/10).

Oleh karena itu jika ada kerusakan talut yang terjadi pada November sampai akhir tahun, pola perbaikannya tidak bisa dilakukan secara permanen. Hal ini karena dari aspek waktu tahun

anggaran sudah tidak mencukupi dengan akan adanya cuti panjang akhir tahun. Pasalnya perencanaan dengan pihak ketika setidaknya membutuhkan waktu satu bulan. Belum lagi kendala pekerjaan saat musim hujan dari aspek material pasir dan semen.

Dengan begitu, kerusakan talut yang mungkin terjadi pada November hanya bisa ditangani secara semi permanen yang melibatkan swakelola.

"Kami sesuaikan dengan ketersediaan barang yang ada di gudang. Untuk bronjong masih ada 96 buah dan karung ada sekitar 300an untuk diisi pasir dan batu. Yang penting bisa ditangani untuk keselamatan warga, se-

dangkan permanennya tahun 2021," urainya.

Aki Lukman berharap, sampai akhir tahun ini saat musim hujan tidak terjadi kerusakan talut dengan skala besar. Namun jika hal itu terjadi, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi berwenang seperti Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSO) yang memiliki tanggung jawab terhadap talut sungai.

Meski demikian, kerusakan talut yang berkaitan dengan bina marga maupun permukiman, masih berpotensi bisa ditangani. Pasalnya Bidang Bina Marga dan Bidang Permukiman memiliki dana insidental tersendiri yang bisa dikolaborasikan. "Terpenting ialah keselamatan warga dulu. Kondisi tutup tahun anggaran yang dimajukan ini juga sudah kami sampaikan ke Komisi C DPRD Kota Yogya. Kita berharap tidak ada kerusakan talut, namun tenaga swakelola juga akan kami optimalkan," katanya. (Dhi) f

| Instansi       | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas PUPKP | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 26 April 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005